

05_JURNAL ACHMAD TJAHJONO JKB V24 01 JANI 2016

by STIE Widya Wiwaha

Submission date: 28-Jun-2022 07:30AM (UTC+0900)

Submission ID: 1863873276

File name: 05_JURNAL_ACHMAD_TJAHJONO_JKB_V24_01_JANI_2016.pdf (92.49K)

Word count: 4439

Character count: 28113

PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI DIY

Achmad Tjahjono

Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, email: cahyoww@yahoo.co.id

Rika Oktavianti

Alumnus Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Abstract

This research aim to reveal the influence of local own revenue effectivity ratio, general allocation fund, and special allocation fund to the local financial independence level on districts and city in Daerah Istimewa Yogyakarta. The method of this research is cauivative research design. Budget realization report from each districs and city in Daerah Istimewa Yogyakarta as population from the year 2010 to 2014. Techniques of data analysis using multiple linear regression. The Partial result show that local own revenue effectivity ratio did not significantly effect on the local financial independence level. While, general allocation fund, and special allocation fund impact negative significantly effect on the local financial independence level. The Simultaneously result show that local own revenue effectivity ratio, general allocation fund, and special allocation fund impact positive significantly to the local financial independence level.

Keyword : local financial independence level, local own revenue effectivity ratio, general allocation fund, special allocation fund

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan banyaknya pembenahan dalam pengelolaan dibidang ekonomi, politik, hukum, dan perundang-undangan, berlanjut hingga ke bidang lain termasuk bidang pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dan Daerah. Pembenahan di bidang keuangan daerah dilakukan dengan mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

1
Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan Pemerintah Daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta dalam (Susantih dan Saftiana, 2008) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas

yang di berikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk kemandirian daerah. Hal ini membuat topik tentang kemandirian keuangan daerah dalam era otonomi semakin tertarik untuk dibahas. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemkot. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka Pemkab/Pemkot tersebut dapat dikatakan mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar di gali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Sementara Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat semestinya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Namun yang terjadi dewasa ini, justru sebaliknya yaitu daerah makin bergantung terhadap alokasi transfer dari Pemerintah Pusat terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Itupun daerah yang terletak di Pulau Jawa yang secara historis sudah kuat sejak lama.

Selanjutnya, Halim (2001 : 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu : 1) Kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Jika dilihat dari perspektif kemampuan daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pelaksanaan otonomi dalam bidang keuangan sesungguhnya sangat kecil. Ini berarti peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya tidak akan berarti. Daerah-daerah lebih bertumbu kepada sumber pendapatan dari Dana Perimbangan. Implementasi kebijakan perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu di dorong untuk menggali potensi daerahnya guna memperkuat posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pusat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Rasio

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus baik secara parsial maupun simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

RERANGKA TEORITIS

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim: 2007). Definisi otonomi daerah menurut UUNomor 23 Tahun 2014 adalah otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan adanya otonom daerah menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:23), adalah pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Menurut Mamesah dalam Halim (2014:25), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan asli daerah (PAD) adalah

semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Yani dalam (Marizka, 2013:5), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007:232), Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Maka menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing Pemkab-/Pemkot untuk meng-gali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan PAD dalam jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerah, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Saragih dalam (Marizka, -2013:5) bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah

sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, sesuai dengan prioritas nasional.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:232), kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri

dari segi finansialnya sehingga Pemerintah Daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Populasi

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Kab/Kota yang ada di Provinsi DIY yaitu Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang ada di Provinsi DIY sebanyak 1 Kota dan 4 Kabupaten.

Teknik Pengambilan Sampel

Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah :

1. Pemerintah Kabupaten/ Kota di DIY yang telah menyusun laporan keuangan tahun 2010-2014.
2. Laporan Keuangan Daerah tahun 2010-2014 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2010-2014 telah dipublikasikan melalui *website* resmi BPK.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai obyek penelitian. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan data keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi DIY yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta. Dokumen yang diperlukan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY.

Teknik Pengujian dan Analisis Data

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, maupun rasio.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu alat analisis yang menguraikan data hasil penelitian tanpa melakukan pengujian.

Analisis Inferensial

Analisis Inferensial adalah analisis data yang dilakukan berdasarkan atas data deskriptif kemudian dianalisis secara regresi linear. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, maka model empirik yang digunakan untuk melakukan pengukuran hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan Analisis Regresi Berganda, Uji Koefisien Determinasi R^2 , Uji F dan Uji-t.

Analisis Regresi Berganda adalah analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression*). Koefisien determinan (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel tergantung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan data *time series* dalam kurun waktu 2010-2014. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 5 kabupaten/kota x 5 tahun = 25 data. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Nilai KS-Z	Tingkat Signifikansi	Keterangan
Rasio Efektivitas	0.333	1.000	Normal
DAU	0.602	0.862	Normal
DAK	0.499	0.965	Normal
KEMANDIRIAN	0.645	0.800	Normal

Sumber : Data Diolah 2015

Hasil uji dengan Kolmogorov-Smirnov sebagaimana dalam tabel 1 diketahui untuk semua variabel mempunyai signifikan >0.05 artinya semua variabel berdistribusi normal, sehingga keseluruhan data penelitian memenuhi syarat normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas yang terdiri dari rasio efektivitas, dau, dan dak. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Rasio Efektivitas	.820	1.219
DAU	.299	3.345
DAK	.286	3.495

Sumber : Data diolah 2015

Berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel 2 diperoleh nilai tolerance untuk masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik hetero-keadastisitas, yaitu adanya ketidak-samaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam pengujian ini digunakan uji glesjer dengan membandingkan nilai signifikan, apabila signifikan > 0,05 atau 5 % maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung masalah. Hasil uji glesjer dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	t	Sig
Rasio Efektivitas	-0.471	0.643
DAU	-1.397	0.177
DAK	1.479	0.154
KEMANDIRIAN	1.486	0.152

Sumber : Data diolah 2015

Berdasarkan uji glesjer pada tabel 3 diperoleh nilai signifikan semua variabel independen lebih dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Hasil dari uji autokorelasi dengan uji statistik durbin-watson dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Uji Autokorelasi Durbin Watson

Variabel	R	R Square	Adjusted R Square	DW
1	0.947	0.897	0.882	1.216

Sumber : Data diolah 2015

Berdasarkan *Durbin-Watson* pada tabel 4 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.216, dengan jumlah data (n) = 25, jumlah variabel independen = 3, maka nilai DW 1,216 berada diantara -2 sampai +2 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda karena menyangkut tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Hasil Uji Regresi

Variabel	Unstandardized Coefficient		Sig
	B	Std. Error	
(Constant)	54.375	11.169	0.000
Rasio Efektivitas	0.041	0.070	0.569
DAU	-0.699	0.156	0.000
DAK	-1.376	0.461	0.007

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji regresi diatas dapat dibuat persamaan untuk model regresi sebagai berikut :

$$Y = 54,375 + 0,041X1 - 0,699X2 - 1,376X3$$

Keterangan :

- Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- X1 = Rasio Efektivitas PAD
- X2 = DAU
- X3 = DAK

Angka yang dihasilkan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 54,375. Hal ini berarti jika variabel independen yaitu Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK tidak ada atau nol, maka besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 54,375.

- b. Variabel Rasio Efektivitas PAD (X1) memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,041 menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika Efektivitas PAD ditingkatkan maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,041.
- c. Variabel DAU (X2) memiliki nilai koefisiensi sebesar -0,699 menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika Rasio DAU ditingkatkan maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,699.
- d. Variabel DAK (X3) memiliki nilai koefisiensi sebesar -1,376 menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika Rasio DAK ditingkatkan maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 1,376.

Uji-t (Uji Parsial)

Uji signifikansi parsial (Uji-t) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hasil uji-t dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Hasil Uji-t

Variabel	B	t	Sig
(Constant)	54.375	4.869	0.000
Rasio Efektivitas	0.041	0.578	0.569
DAU	-0.699	-4.489	0.000
DAK	-1.376	-2.983	0.007

Sumber : Data diolah 2015

Berdasarkan uji -t pada tabel 6 diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Variabel Rasio Efektivitas (X1) mempunyai sig. 0,569 lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai t hitung sebesar 0,578 lebih kecil dari t tabel 2,074. Hasil ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak

artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Variabel DAU (X2) mempunyai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05, sedangkan t hitung sebesar -4.489 lebih besar dari t tabel 2,074. Hasil ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Variabel DAK (X3) mempunyai sig. 0,007 lebih kecil dari 0,05, sedangkan t hitung sebesar -2,983 lebih besar dari t tabel 2,074. Hasil ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Uji-F (Uji Simultan)

Uji signifikansi simultan (Uji-F) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hasil uji-F dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7
Hasil Uji-F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1530.159	3	510.053	60.823	.000
Residual	176.104	21	8.386		
Total	1706.263	24			

Sumber : Data diolah 2015

Berdasarkan uji-F pada tabel 7 diperoleh nilai F hitung sebesar 60,823 dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0,05. dan F hitung sebesar 60,823 lebih besar dari F tabel sebesar 3,05 berarti Ha diterima dan Ho ditolak artinya Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi

PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI DIY

naik turunnya variabel dependen. Hasil dari koefisien determinan dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.947 ^a	.897	.882

Sumber : Data diolah 2015

1 Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui nilai R sebesar 0,947 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,897 atau 89,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan variabel independen (Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK) terhadap variabel dependen (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah) sebesar 89,7 % dan sisanya 10,3 % dipengaruhi oleh sebab-sebab lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY. Hal ini berarti jika Rasio Efektivitas PAD lebih besar dibandingkan dengan bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga Pemerintah Daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika Rasio Efektivitas PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan Pemerintah/Provinsi seperti : DBH, DAU, dan DAK maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam Pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lain karena PAD merupakan sumber

keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan sehingga optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY. Hal ini berarti jika DAU yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya.

Penggunaan DAU yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat belum digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh daerah berarti penggunaan dana tersebut belum mencapai target atau tujuan kepentingan publik serta penggunaannya belum untuk menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY. Hal ini berarti semakin besar DAK yang diterima oleh daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil DAK yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Kelautan & Perikanan, Pertanian, Prasarana Pemerintah Daerah serta Lingkungan Hidup.

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas, DAU, dan DAK bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung sebesar 60,823 lebih besar dari F tabel sebesar 3,05. Hal ini didukung dari nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,897 atau 89,7 % yang menunjukkan bahwa presentase sumbangan variabel independen (Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK) terhadap variabel dependen (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah) sebesar 89,7 % dan sisanya 10,3 % dipengaruhi oleh sebab-sebab lain.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Rasio Efektivitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena memiliki signifikansi 0,569 lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung 0,578 lebih kecil dari t tabel 2,074.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian Keuangan Daerah karena memiliki signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung -4,489 lebih besar dari t tabel 2,074.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena memiliki signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung -2,983 lebih besar dari t tabel 2,074.

4. Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai F hitung 60,823 lebih besar dari F tabel 3,05.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil pengujian *Negelkerke R Square* dalam penelitian ini sebesar 89,7%. Artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya 89,7 %, sedangkan sisanya 10,3 % dipengaruhi faktor lain, sehingga ketepatan dalam variabel ini masih kurang. Masih ada faktor-faktor lain yang disinyalir memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota.
3. Rentang waktu penelitian hanya dilakukan pada tahun 2010-2014 (5 tahun).

Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan dari simpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, untuk tujuan perbaikan pada penelitian yang akan datang, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin perlu diperhatikan bagi peneliti lain dalam membantu penelitian berikutnya :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain seperti : a). DBH (Dana Bagi Hasil) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. b). Pendapatan lain-lain yang sah merupakan

Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah (BUMD). c). Investasi merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya: pembelian obligasi, pemberian pinjaman, dsb.

2. Menambah sampel, misalnya sampel diambil dari Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia.
3. Menambah jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2006), *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2001), *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul (2007), *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi (2014), *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marizka, Reza (2013), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)". *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang Fakultas Ekonomi..
- Noordiawan, Deddi dan Noordiawan, Hertanti (2010), *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jakarta.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja*. Jakarta.
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- _____, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Sugiyono (2010), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Susantih dan Saftiana (2008), "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan", *Tesis PPS UNSRI*, Sumatera Selatan.
- Wiyono, Gendro (2011), *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*, Yogyakarta : STIM YKPN.
- www.yogya.bpk.co.id
- www.djpk.depkeu.go.id

ORIGINALITY REPORT

96%
SIMILARITY INDEX

96%
INTERNET SOURCES

42%
PUBLICATIONS

46%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 download.garuda.ristekdikti.go.id **92%**
Internet Source

2 www.pn-purworejo.go.id **1%**
Internet Source

3 id.123dok.com **<1%**
Internet Source

4 adoc.pub **<1%**
Internet Source

5 eprints.uny.ac.id **<1%**
Internet Source

6 123dok.com **<1%**
Internet Source

7 es.scribd.com **<1%**
Internet Source

8 repository.radenintan.ac.id **<1%**
Internet Source

9 docplayer.info **<1%**
Internet Source

10 text-id.123dok.com <1 %
Internet Source

11 e-journal.polnes.ac.id <1 %
Internet Source

12 media.neliti.com <1 %
Internet Source

13 www.scribd.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off